

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

Asrul Ibrahim Nur, 2022, 'Monografi Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'. In *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konstelasi Dan Kontroversi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amin Suprihatini, 2007, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.

Abraham Iiyas, 1999, *Lembaga Kekerabatan Datuk Soda*. Padang: Lembaga Kekerabatan Datuk Soda.

Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Hestu Cipto Hdanoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*. 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*.

- Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, 2016, *Ekonomi Pembangunan : Sebuah Kajian Teoretis Dan Empiris*. Jakarta: Deepublish.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1998, *Ukiran Tradisional Minangkabau*. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y. Ferdinan, 2019, *Akuntansi Dana Desa*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Didik Sukrionon, Syaiful Aris M, dan Umbu Pariangu, 2004, *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*. Malang: Intrans Institute.
- Duto Sosialismanto, 2001, *Hegemoni Negara : Ekonomi Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Academic (India) Publishers.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Firman Sujadi, dkk. 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law dan State*. New York: Russell dan Russell.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- . *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Pemerintahan Desa Atau Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah : Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jeffrey Hadler, 2010, *Sengketa Tiada Pulus: Matriarkat, Reformisme Agama, Dan Kolonialisme Di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute.
- Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- . 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Krishna D. Darumurti dna Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah : Perkembangan Pemikiran Dan Pelaksanaan*. Bdanung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum : Dalam Perspektif Perundang-Undangan : (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP Books.

- . 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nusa Media.
- Mansyur Achmad, 2018, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintah Desa : Perspektif Regulatif Dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM.
- Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Pres.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Dan Ilmu Penelitian*. Bdanung: CV. Mdanar Maju.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasrun Dt. Marajo Sungut dan Edison, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara : Suatu Kajian Teoritis Tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- . 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: UII Press.

———. 2009, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana.

Rusli Amran, 1981, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rusli K. Iskandar, 2001, *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

R. Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.

R. Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bdanung: Binacipta.

Syaiful Huda, 2017, *Dari Desa Membangun Indonesia*. Bdanung: PT Granesia.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saifuddin Azwar, 2009, *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar.

Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- S. Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Bdanung: Citra Aditya Bakti.
- Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Wali Press.
- The Liang Gie, 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia : Suatu Analisa Tentang Masalah-Masalah Desentralisasi Dan Tjara-Tjara Penjelesiannya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Utang Rosidin, 2019, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pusaka Setia.
- Wiyono, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulqayyim, 2006, *Boekit Tinggi Tempo Doeloe*. Padang: Danalas University Press.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

- Danryan. 'Harmonisasi Pemerintah Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pmerintahan'. *Jurnal Legalisasi Indonesia* Volume 16, Nomor. 4 (2019).
- Asrori. 'Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus'. *Jurnal Bina Praja* Volume 6, Nomor 2 (2014): <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>.

A. Hamid S. Attamimi, 'Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum'. *Hukum Dan Pembangunan* (1989)

Arie Elcaputera, 'Urgensi Harmonisasi Rancangan Eraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah'. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, Nomor 1 (2022): <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.

Aulia Rahmat, 'Rekognisi Dan Reposisi Aktor Dalam Asimilasi Hukum Lama Di Nagari (Baru) Sumatera Barat'. *Indonesian Journal of Religion dan Society*, Volume 2, Nomor 2 (2020): <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.106>.

Agus Pribadiono, 'Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU NO. 6 Tahun 2014: Antara Kemdandirian Dan Subordinasi Pengaturan'. *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 6 (2016).

Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify. 'Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat'. *Rechtsvinding*, Volume 12, Nomor 1 (2013): <https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1152>.

Danin Sofyanoor, 'Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As an Allocative System'. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (2015): <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.293>.

Burhanudin Mukhamad Faturahman, 'Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Perekrutan Dan Penjaringan Perangkat Desa'. *Jurnal Sosial Politik* Volume 4, Nomor 1 (2018): <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557>.

Ellyta Yullyanti, 'Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Pada Kinerja Pegawai'. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 3 (2011): 10. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i3.615>.

Hengki Danora, 'Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman'.  
*Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 2 (2011).

Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena. 'Kedudukan Dan Peranan Peraturan  
Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait'. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, (2015)

Jeffri S. Pakaya, 'Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Pemberian  
Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi  
Indonesia*, Volume 13, Nomor 1 (2016).

Muhamad Sadi Is, dkk. 'The Principle of Democracy dan Participation in Making  
Village Regulations as an Effort to Develop a Just Village'. *Jurnal Hukum  
Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023).

Putra Perdana Ahmad Saifulloh Amancik dan Sonia Ivana Barus. 'Reformulasi  
Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Republik Indonesia'. *Jurnal RechtsVinding* Volume 12, Nomor 2 (2023).

Supriyadi A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. 'Isu Hak Konstitusional  
Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala  
Desa'. *Konstitusi* Volume 19, Nomor 4 (2022).

Sri Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin. 'Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Di  
Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kebijakan Pengisian Jabatan Sekretaris  
Desa)'. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 8, Nomor 1 (2008):  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.18>.

Wicipto Setiadi, 'Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki  
Kualitas Peraturan Perundang-undangan'. *Jurnal Legislasi Indonesia*,  
Volume 4, Nomor 2 (2007).

Yoserwan Tenofrimer dan Diana Arma. 'Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba  
Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal Di Sumatera Barat'. *Nagari Law*



*Review*, Volume 4, Nomor 1 (2020).

Yanis Maladi, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amdanemen'. *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3 (2010).

Yusnani Hasjimzoem, 'Dinamika Hukum Pemerintahan Desa'. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, Nomor 3 (2015): <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.

Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata. 'Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 1 (2018). <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

### C. Internet

Cindy Mutia Annur, 'Jumlah Desa Maju Dan Mdaniri Di Indonesia Semakin Meningkat, Ini Trennya'. [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/jumlah-desa-maju-dan-mdaniri-di-indonesia-semakin-meningkat-ini-trennya>.

Edward Silaban, 'Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa'. [ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id), 2023. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-des>.

Efri Zon, 'Ombudsman Sumbar Minta Klarifikasi Camat & Pj Wali Nagari Sungai Aua'. [salingkamedia.com](https://salingkamedia.com), 2022. <https://salingkamedia.com/ombudsman-sumbar-minta-klarifikasi-camat-pj-wali-nagari-sungai-aua/>.

Roni Akhyar, 'Pengadilan TUN Padang Kabulkan Gugatan Kepala Jorong Nagari Sungai Aua Pasbar'. [portalberitaeditor.com](https://www.portalberitaeditor.com), 2022. <https://www.portalberitaeditor.com/pengadilan-tun-padang-kabulkan-gugatan-kepala-jorong-nagari-sungai-aua-pasbar/>.

[ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id). 'Pemberhentian Perangkat Nagari Secara Sepihak Marak Terjadi Di Sumbar'. [ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id), 2021.

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pemberhentian-perangkat-nagari-secara-sepihak-marak-terjadi-di-sumbar>.

Sugiman. 'Pemerintah Desa'. *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.  
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

#### **D. Wawancara**

Syaikhul Putra, 20 Juli 2024, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Wawancara, 20 Juli 2024, Mhd Zenni, Pj. Wali Nagari Sungai Aua, Pasaman Barat.

Wawancara, 20 Juli 2024, Fidel alnafi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pasaman Barat.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 3)

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 30)

**F. Putusan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2021/PTUN-PDG  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

